



PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945

Heroisme Rakyat Surabaya

DISJARAHAD
2017



PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945,

Heroisme Rakyat Surabaya

Diterbitkan Oleh :
DINAS SEJARAH ANGKATAN DARAT
Bandung, 2017

PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945,

Heroisme Rakyat Surabaya

Penanggung Jawab :

Kadisjarahad

Brigadir Jenderal TNI Djashar Djamil, S.E., M.M.

Nara Sumber :

Sesdisjarahad, Kolonel Inf Tri Suseno, S. Sos.

Kabalaklisjarah, Kolonel Caj Drs. Nurwasis, M.M.

Ketua Pelaksana/Penyusun :

Letkol Caj Drs. Yusuf Ambari

Wakil Ketua:

Mayor Inf Asep Dedi M, S. Ag

Anggota :

Mayor Inf Narjiono

Drs. Arief Lazuardi PNS IV/a

Perwita Sari, S.S., M.Hum. PNS III/b

Neni Rohaeni, S. Kom PNS III/b

ISBN : 978-602-7846-24-1

Dicetak oleh : CV. ALFABETA

DITERBITKAN UNTUK LINGKUNGAN SENDIRI DAN TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja mengajarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).



**KEPALA DINAS SEJARAH
ANGKATAN DARAT**

**KATA PENGANTAR
PADA PENERBITAN BUKU SEJARAH PERISTIWA**

**PALAGAN SURABAYA
10 NOVEMBER 1945,**

Heroisme Rakyat Surabaya



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami dapat menerbitkan buku sejarah yang berjudul: **"PALAGAN SURABAYA 10 November 1945, *Heroisme Rakyat Surabaya*"**.

Apabila ditinjau dari perspektif penulisan sejarah perang, penulisan Palagan Surabaya merupakan historiografi sejarah militer Angkatan Darat yang memiliki makna tentang keterpaduan perjuangan antara pasukan TKR dan para pejuang lainnya beserta rakyat di Kota Surabaya dan sekitarnya melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang, Sekutu, dan Belanda NICA (*Nederlands Indies Civil Administrations*).

Perlawanan berlangsung dari tanggal 28 Oktober 1945 sampai dengan tanggal 10 November 1945. Tanggal 10 November 1945 merupakan momen historis yang terkenal dari Palagan Surabaya sebab memperlihatkan ciri klasik suatu pertempuran yang tidak seimbang antara tiga negara yang terlibat Perang Dunia II yaitu Jepang, Belanda (Nica) dan Sekutu (Inggris) melawan rakyat Indonesia di Kota Surabaya yang notabene negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan.

Dinas Sejarah Angkatan Darat yang mengemban fungsi khusus sejarah militer Angkatan Darat, menyusun buku sejarah peristiwa Palagan Surabaya dimaksudkan untuk mengambil hikmah nilai-nilai diantaranya nilai patriotisme, heroisme dan keikhlasan berkorban dari para pendahulu bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman penjajah, sehingga dapat menginspirasi semangat dan militansi dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kami juga mengharapkan adanya masukan dari para pembaca untuk perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan petunjuk-Nya untuk melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Bandung, Januari 2017

Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat



Djashar Jamil, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI



KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

**SAMBUTAN
PADA PENERBITAN BUKU SEJARAH PERISTIWA**

**PALAGAN SURABAYA
10 NOVEMBER 1945,**

Heroisme Rakyat Surabaya



Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku sejarah peristiwa yang berjudul: **PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945, *Heroisme Rakyat Surabaya***.

Selaku pimpinan Angkatan Darat, saya sangat apresiasi dan menyampaikan terima kasih, serta penghargaan yang tinggi kepada Dinas Sejarah Angkatan Darat dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Penerbitan buku sejarah Palagan Surabaya ini sangat diperlukan, sebab salah satu objek sejarah militer dunia adalah peristiwa-peristiwa monumental yang dapat memberikan inspirasi, semangat juang sekaligus ajang pembelajaran kepada generasi muda TNI AD dalam hal taktis, strategis dan historis militer. Buku Palagan Surabaya ini dapat dipandang sebagai literatur sejarah operasi militer Angkatan Darat untuk perang, sebab peristiwa-peristiwa heroik dan patriotik mengakomodir semangat perjuangan para pendahulu telah melampaui jamannya

Semoga kehadiran buku ini dapat memberi inspirasi guna memperteguh moril, semangat dan keutuhan batin kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Staf Angkatan Darat,



Mulyono
Jenderal TNI

DAFTAR ISI

JUDUL BUKU	Hal i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KASAD	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II KEADAAN SOSIAL POLITIK DAN MILITER	
1. Kondisi Wilayah dan Keadaan Sosial di Kota Surabaya	15
2. Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI	21
3. Perebutan Objek Penting dan Senjata dari Tangan Tentara Jepang	29
 BAB III LATAR BELAKANG PERISTIWA	
1. Upaya Menegakkan Kemerdekaan	57
2. Lahirnya Organisasi Perjuangan di Surabaya	61
3. Kedatangan Tentara Sekutu di Surabaya ..	101
 BAB IV PERISTIWA 10 NOVEMBER 1945	
1. Peristiwa Yang Mendahului	109
2. Perundingan Dengan Sekutu	131
3. Ultimatum Dari Sekutu	144
4. Meletusnya Pertempuran 10 Nopember 1945	173

BAB V DAMPAK PERISTIWA PALAGAN SURABAYA

1. Taktis Militer	269
2. Strategis dan Politis	271
3. Psikologis	273
4. Ekonomi dan Sosio Kultur	276

BAB VI PENUTUP	279
-----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	283
-----------------------------	------------

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	291
---	------------

INDEKS TEMPAT	296
----------------------------	------------

INDEKS NAMA	301
--------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR	309
----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Kekuatan Tempur Pasukan RI September – Oktober 1945 di Surabaya ...	312
2. Kekuatan Tempur Pasukan RI Oktober – November 1945 di Surabaya.....	314

BAB I

Pendahuluan

TNI sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan.¹⁾ Pembela sejati daripada kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Untuk membela kemerdekaan tersebut, Dia sanggup dengan disiplin baja mengorbankan segala-galanya. Karena kesanggupan untuk membela kemerdekaan tanah air dan bangsanya tersebut dengan kekuatan tentara kebangsaan bersama-sama rakyat, maka adanya tentara asing di tanah airnya dianggap mengurangi kemerdekaan itu.²⁾ Pernyataan tersebut disampaikan oleh Panglima Besar TKR Jenderal Sudirman dan pernyataan salah satu tokoh pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya Bung Tomo.

¹⁾ Disjarahad, *Pesan Moral Panglima Besar Jenderal Soedirman*, Bandung, 2011, hal. 6.

²⁾ Penyunting Frans M. Parera, *Bung Tomo Dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru Kumpulan Karangan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 131.

Pernyataan tersebut disampaikan bukan tanpa dasar, dibuktikan dari rangkaian peristiwa bersejarah setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kurang lebih terjadi Delapan Palagan Yang Menentukan kehidupan bangsa sesudahnya yaitu pertempuran antara BKR/TKR dan rakyat melawan Jepang, Sekutu (Inggris), Belanda (NICA).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sangat rnenggemparkan dunia, terutama bagi orang-orang Belanda kolonial. Mereka sama sekali tidak menyangka dan tidak mau mengerti bahwa bekas negeri jajahan mereka dapat begitu saja memerdekakan dirinya. Orang-orang Belanda kolonial tidak rela bangsa Indonesia merdeka. Mereka masih ingin tetap menjajah bangsa Indonesia.

Menurut orang-orang Belanda kolonial, bangsa Indonesia belum matang untuk merdeka, untuk memerintah sendiri negeri mereka, dan belum mampu untuk berdiri sendiri. Anggapan orang-orang Belanda, merekalah yang menyandang tugas suci untuk mendidik dan menuntun bangsa Indonesia selangkah demi selangkah untuk kemudian pada suatu waktu yang dikehendaki oleh orang-orang Belanda yang baik hati bangsa Indonesia sudah dianggap matang untuk merdeka dan mampu berdiri sendiri. Pada waktu itulah baru Indonesia Merdeka diserahkan oleh orang-orang Belanda yang sangat bijaksana sebagai hadiah kepada bangsa Indonesia. Kapan waktu itu tiba, ada pendapat yang sangat berbeda antara pemuda patriot bangsa Indonesia yang mendambakan

Indonesia Merdeka secepat-cepatnya dan orang-orang Belanda kolonial yang merasa dirinya dibebani tugas suci untuk mendidik dan membimbing bangsa Indonesia sampai matang untuk merdeka dan mampu berdiri sendiri.

Jika pada tahun 1925 pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia sudah mengemukakan slogan Indonesia Merdeka Sekarang Juga, maka lain pula pendapat orang-orang Belanda kolonial, di dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jenderal B.C. De Jonge. Pada tahun 1935 Gubernur Jenderal B.C. De Jonge ditanya oleh seorang wartawan bekas diplomat bangsa Inggris bernama *Bruce Lockhart* kapan kira-kira waktunya bangsa Indonesia sudah dianggap matang untuk merdeka dan berdiri sendiri, jawab pembesar tertinggi Hindia Belanda pada waktu itu:

"....Kami bangsa Belanda di sini (di Indonesia, penulis) sudah tiga ratus tahun. Kami masih akan ada di sini tiga ratus tahun lagi. Sesudah itu kita dapat berunding....³⁾"

Kata-kata ini diucapkan oleh Gubernur Jenderal B.C. De Jonge pada tahun 1935. Dengan demikian apabila mengikuti pola pikir orang-orang Belanda kolonial sesuai dengan ucapan pembesar tertinggi Belanda di Hindia

³⁾ Sri Sutjiatiningsih, *Gubernur Suryo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1982/1983, hal 65.

Belanda pada waktu itu, maka Indonesia baru pada tahun 2235 (tahun 1935 + 300 tahun) akan diadakan perundingan untuk kemerdekaan Indonesia.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu diterima dengan sangat terkejut oleh orang-orang Belanda kolonial yang merasa dirinya mendapat misi suci untuk memerdekakan bangsa Indonesia, melalui pendidikan dan bimbingan yang sebaik-baiknya sampai bangsa Indonesia betul-betul mandiri untuk memerdekakan diri.

Demikian pula menurut orang-orang Belanda kolonial seperti Dr. H.J. van Mook, Ch. O. Van der Plas dan lain-lainnya, bahkan Juga orang-orang Indonesia yang pro Belanda seperti R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, pada tanggal 17 Agustus 1945 belumlah waktunya bagi bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Menurut mereka bangsa Indonesia belum matang, dan belum sanggup berdiri sendiri.

Karenanya setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 tugas bangsa Indonesia belum selesai, bahkan makin bertambah berat, sebab bangsa Belanda masih berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan penjajahannya di Indonesia, dengan jalan apapun dan dengan cara bagaimanapun juga. Maka bangsa Indonesia harus siap memberikan pengorbanan apapun juga untuk membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan tanah airnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sebagai kelanjutan menyerahnya Jepang, masuklah tentara pendudukan Sekutu dalam hal ini Inggris dan Australia ke Indonesia yang bernaung di bawah bendera *Allied Forces In The Netherlands East Indies* (AFNEI). Pada bulan September 1945 mendarat pasukan Australia di Ambon, Manado, Kupang, Makassar, Banjarmasin, dan Pontianak. Kemudian menyusul pendaratan pasukan Inggris di Jakarta pada tanggal 29 September 1945, di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945, di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945, di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 meluas hingga menduduki Ambarawa, Magelang dan sebagainya.⁴⁾

Setelah tentara Sekutu menduduki beberapa kota di Indonesia, selanjutnya pada tanggal 29 September 1945, Panglima AFNEI menyiarkan lewat radio tentang tugas-tugas tentara pendudukan Sekutu, sebagai berikut:

- a. Melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan perang dan orang-orang interniran yang diselenggarakan oleh badan yang bernama *Allied Prisoners of War and Internees* (AFWI)
- b. Melucuti tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke negaranya

⁴⁾ A. H. Nasution, *10 Nopember 1945 di Surabaya*, Angkasa, Bandung, 1976, hal. 4.

- c. Memelihara ketertiban dan keamanan umum agar yang termaktub di atas dapat dilaksanakan.⁵⁾

Andai saja tentara pendudukan Sekutu secara normatif melaksanakan tugas-tugas di atas dengan baik, tentu tidak akan terjadi konflik terbuka dengan rakyat Indonesia. Karena tentara pendudukan Sekutu terikat pada janjinya kepada pihak Belanda, sebagaimana tercantum dalam memorandum *Civil Affairs Agreement* tertanggal 24 Agustus 1945 bahwa: "Tentara pendudukan Sekutu untuk Indonesia adalah pasukan Inggris atau Persemakmurnya dan Panglima tentara Inggris untuk sementara akan memegang kekuasaan di Indonesia atas nama pemerintah Belanda."⁶⁾ Maka dengan segala konsekuensinya tentara Sekutu (Inggris) berupaya keras memenuhi memorandum *Civil Affairs Agreement*, walaupun harus bertempur dengan BKR/TKR dan para pejuang bangsa Indonesia. Sehingga banyak prajurit Inggris yang gugur, luka dan hilang.

Pemerintah Kerajaan Inggris bersikukuh untuk menguasai Indonesia umumnya dan Surabaya khususnya, yang kelak akan dikembalikan hak kolonisasi tanah air Indonesia kepada Kerajaan Belanda, hal ini berkaitan erat dengan realitas geopolitik global bahwa saat itu, ketika Perang Dunia II masih berlangsung, F.S.V. Donnison seorang pegawai Pemerintah Militer Inggris pernah mengungkapkan bahwa sesudah Singapura, Surabaya

⁵⁾ Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*, Edisi ke-2, Angkasa, Bandung 1979, hal. 46.

⁶⁾ Nasution, *opcit*, hal. 5

PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945,

Heroisme Rakyat Surabaya

adalah kota yang harus diduduki karena merupakan daerah kunci. *"Surabaya, which under the original plan was to have been the second of two key areas to be occupied..as Sourabaya had been the larges Japanese naval base after Singapore"*. Demikian pemikirannya, sebab posisi Surabaya menurut Prof. Russel H. Fifield seorang ahli ilmu politik dan sejarah di Michigan University Amerika adalah vital sekali dalam penguasaan daerah maritim yang berlingkaran dua, yaitu lingkaran Asia Tenggara dan Barat Daya Pasifik. *"In more specipic terms the strategic naval base problems of sea power in South East Asia and the South West Pacific."*⁷⁾

Tercatat dalam peristiwa Palagan Surabaya dua orang jenderal Inggris gugur, yaitu Komandan Brigade India ke-49 Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby⁸⁾, dan Komandan Detasemen Artileri Inggris Brigadir Jenderal Robert Guy Loder-Symonds DSO MC,⁹⁾ dan seorang *Flight Officer* (Penerbang Inggris). Gugurnya dua orang perwira tinggi Inggris, di tambah 220 perwira dan prajurit tewas serta 80 orang perwira dan prajurit luka berat, sudah barang tentu secara moral sangat memalukan tentara Sekutu pada dunia internasional, yang *nota bene* sebagai pemenang Perang

7) Heru Sukardi, Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Jawa Timur, DepP dan K, Jakarta 1991, hal. 105-106. Pemandangan lihat: Roeslan Abdulgani, *On Heroes Day and The Indonesia Revolution*, Prapanca, Jakarta, 1964, hal. 104.

8) Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*, Disjarahad-Fa. Mahjuma, Bandung, 1972, hal. 61.

9) Des Alwi, *Pertempuran Surabaya November 1945*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2011. hal. 404.

Dunia kedua. Karenanya realitas tersebut dijadikan dalih oleh tentara Inggris untuk menghancurkan pasukan TKR dan para pejuang bangsa Indonesia di Surabaya yang mereka anggap sebagai gerombolan bersenjata RI.

Upaya tersebut oleh Sekutu dianggap meratakan jalan ke arah terwujudnya pengembalian kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda dengan cepat dan murah. Sikap tersebut terlihat pada kebijakan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn selaku Panglima Divisi India ke-23 yang diberi tugas oleh Sekutu untuk mengamankan wilayah Jawa, Madura, Bali dan Lombok, dimana pada tanggal 27 Oktober 1945 memerintahkan agar TKR dan para pejuang dari kalangan rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka, kalau tidak diserahkan akan diancam hukuman seberat-beratnya. Bahkan lebih jauh tentara Inggris melakukan kegiatan mempersenjatai tawanan perang bangsa Belanda, menyusupkan tentara Nica di antara 3000 orang pasukan Sekutu di Surabaya, dan juga merampas gedung-gedung pemerintah RI, kendaraan-kendaraan pasukan TKR dan merampas senjata-senjata dari kalangan para pejuang RI.

Pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak tinggal diam, pada tanggal 28 Oktober 1945 secara serentak melakukan perlawanan diseluruh kota Surabaya. Pasukan Sekutu terjepit dan nyaris menemui kehancuran. Sehingga memaksa Letnan Jenderal Christison selaku Panglima tentara Serkutu di Indonesia, segera menghubungi Presiden Sukarno, dicapai persetujuan *cease fire* (gencatan

senjata) dari kedua belah pihak. Untuk sementara situasi pertempuran mereda. Namun pada tanggal 31 Oktober 1945 meletus kembali pertempuran secara sporadis.

Sehingga pada tanggal 9 Nopember 1945, Panglima Divisi India ke-5 Mayor Jenderal E.C. Mansergh selaku Panglima Sekutu di Jawa Timur mengeluarkan ultimatum yang intinya agar rakyat Surabaya tanggal 9 Nopember 1945 paling lambat pukul 18.00 harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Inggris, dan para pemimpin Indonesia termasuk pemimpin TKR, pemimpin Polisi dan Pemerintah Sipil RI di Surabaya harus melaporkan diri kepada tentara Inggris dengan membawa senjata apa saja yang dimiliki, seorang demi seorang harus mendekat dengan tangan di atas kepala kemudian menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa syarat.¹⁰⁾ Bagi orang Indonesia yang menentang ultimatum, harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang akan terjadi karena akan dikerahkan seluruh kekuatan Inggris dari darat, laut dan udara untuk menggempur kota Surabaya.¹¹⁾

Ultimatum pihak Inggris tersebut, sangat melukai hati dan perasaan bangsa Indonesia, khususnya rakyat Surabaya. Maka pemerintah RI di Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, Suryo pada pukul 23.10 menjawabnya: "Lebih baik hancur daripada dijajah

¹⁰⁾ Disjarahad, *opcit*, 1972, hal. 62.

¹¹⁾ Disjarah TNI AD, *Perjuangan Pelajar Bersenjata TRIP Jawa Timur*, Disbintalad, Jalarta, 1985, hal. 70.

BAB I

Pendahuluan

kembali.¹² Pimpinan TKR di Surabaya segera menyiagakan 8 batalyon TKR, 4 batalyon TKR Laut, 2 batalyon Polisi Istimewa, 1 batalyon TRIP ditambah 3 atau 4 batalyon masing-masing dari organisasi pejuang dan laskar Pesindo, Hisbullah, BPRI. Para pemuda dan pemudi di kampung-kampung juga dimobilisir untuk tenaga bantuan PMI, dapur umum serta pos-pos pertahanan dalam kota.

Tepat tanggal 10 Nopember 1945, pukul 06.00 pihak Inggris membombardir kota Surabaya. Mengerahkan kekuatan darat, laut dan udara. Pasukan TKR, para pejuang bersenjata dan laskar serta seluruh rakyat Surabaya menghadapi tentara Inggris diseluruh pelosok kota. Saat itu memang dipihak RI relatif belum memiliki ketrampilan perang yang sejajar dengan Inggris dan baru memiliki semangat yang berapi-api. Akan tetapi para prajurit TKR beserta rakyat Surabaya yang dibantu oleh saudara-saudaranya dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat bahu membahu menghadapi pasukan Inggris dan Nica di Kota Surabaya.

Walaupun dengan senjata keris, tombak, bambu runcing serta senjata hasil rampasan dari pasukan Jepang, mereka tidak mengenal takut berani menghadapi pasukan Inggris disemua front pertempuran, baik di garis pertahanan satu sepanjang Pasar Babakan, garis pertahanan dua sekitar *Viaduct* maupun garis pertahanan tiga di Wonokromo. Pihak Inggris tidak menduga bahwa akan terjadi perlawanan yang begitu sengit dari pasukan TKR

¹²⁾ Nasution, *opcit*, hal. 41.

dan para pejuang lainnya di Kota Surabaya. Inggris memprediksi bahwa pertempuran akan berlangsung cepat dengan korban dipihak Inggris relatif sedikit, namun ternyata memakan waktu 21 hari. Selama pertempuran tersebut banyak jatuh korban pasukan TKR dan rakyat pejuang kurang lebih 6000 orang. Pertempuran Surabaya oleh Inggris di anggap sebagai inferno (neraka).¹³⁾ Dalam buku "*The Fighting Cock*" karya Letnan Kolonel A. J. F. Doulton, antar lain dinyatakan bahwa:

*"..The Indonesians in Surabaya took no account of their dead. When one fell, another came forward. The bren continued to speak, the piles of dead at the barricade mountained, but more and more Indonesians came forward....."*¹⁴⁾

Dan dari pihak *Gurkha Rifles* yang diwakili oleh Mayor R.B. Houston menyatakan bahwa:

*"...Rakyat Indonesia baru dapat dipukul mundur dari kota Surabaya setelah dihujani bom dari udara dan meriam dari laut. Dalam pada itu perlawanan menjalar keseluruh Jawa, bagaikan api membakar hutan....."*¹⁵⁾

Palagan Surabaya merupakan manisfestasi patriotisme rakyat Surabaya terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sekaligus juga

13) A. H. Nasution, *opcit*, hal. 48. Sebagai pembanding lihat: Heru Sukardi, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*) Dep P dan K, Jakarta, 1991, hal. 121.

14) Disjarahad, *opcit*, 1972, hal., 63.

15) *Ibid.*

merupakan "*The losses in this inferno were grievous enough*" bagi tentara Inggris dan Nica.

Relevan dengan itu, Dinas Sejarah Angkatan Darat sesuai dengan peran dan fungsinya, mensosialisasikan nilai-nilai kesejarahan dalam khasanah perjuangan bangsa dibidang militer, menyangkut kearifan lokal dalam spektrum nasional yaitu peristiwa Pertempuran Surabaya yang disusun dalam sebuah buku sejarah berjudul Palagan Surabaya 10 Nopember 1945, yang merupakan bentuk patriotisme rakyat Surabaya.

Buku ini disusun menjurus kearah *preliminary research* atau penelitian permulaan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, dengan pendekatan *deskriptif analisis* pada sumber-sumber pustaka (*library research*), dokumen serta observasi lapangan dengan menarik simpulan secara induksi yang diarahkan pada tri-fungsi penulisan sejarah militer Angkatan Darat yaitu *edukatif-historis*, pewarisan nilai dan komunikasi integratif lintas generasi.

Di antara Delapan Palagan yaitu Palagan Medan, Palagan Palembang, Palagan Bandung, Palagan Ambarawa, Palagan Semarang, Palagan Bali, Palagan Makassar dan Palagan Surabaya, masing-masing Palagan memiliki karakteristik tersendiri. Palagan Surabaya sarat dengan nilai strategis sebab pertempuran secara sporadis meletus setelah terjadi kebuntuan diplomasi antara RI dan Sekutu (Inggris). Sedangkan secara taktis pertempuran bukan bersifat *rural guerilla warfare* (gerilya hutan) tapi

urban guerilla war fare. (pertempuran kota).¹⁶⁾ Maka dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat melengkapi khasanah buku-buku sejarah peristiwa Pertempuran Surabaya yang telah disusun oleh para penulis lainnya.

Penyajian buku ini diawali dari **Bab I** Pendahuluan membahas latar belakang penyusunan, esensi pembahasan dan pengantar perbab. **Bab II** menyajikan keadaan sosial politik dan militer, meliputi bidang bahasan kondisi wilayah dan keadaan sosial Kota Surabaya sikap masyarakat Surabaya terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI serta peristiwa perebutan objek penting, instalasi vital serta senjata dari tangan tentara Jepang.

Bab III menyajikan latar belakang peristiwa 10 Nopember 1945 dengan sub bab bahasan upaya rakyat Surabaya menegakkan Kemerdekaan RI, lahirnya organisasi perjuangan RI di Surabaya serta kedatangan tentara Sekutu di Surabaya. **Bab IV** membahas heroisme rakyat Surabaya 10 Nopember 1945, dengan sub bab bahasan peristiwa yang mendahului sebelum meletus pertempuran 10 Nopember 1945, perundingan dengan Sekutu, ultimatum dari Sekutu serta jalannya pertempuran di Kota Surabaya.

Bab V menyajikan dampak peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 baik secara taktis Militer, strategis dan Politik, psikologis maupun secara ekonomi dan sosio kultur.

¹⁶⁾ Roeslan Abdulgani, *100 Hari Di Surabaya*, Yayasan Idayu Jakarta, 1975, hal. 78.

BAB I Pendahuluan

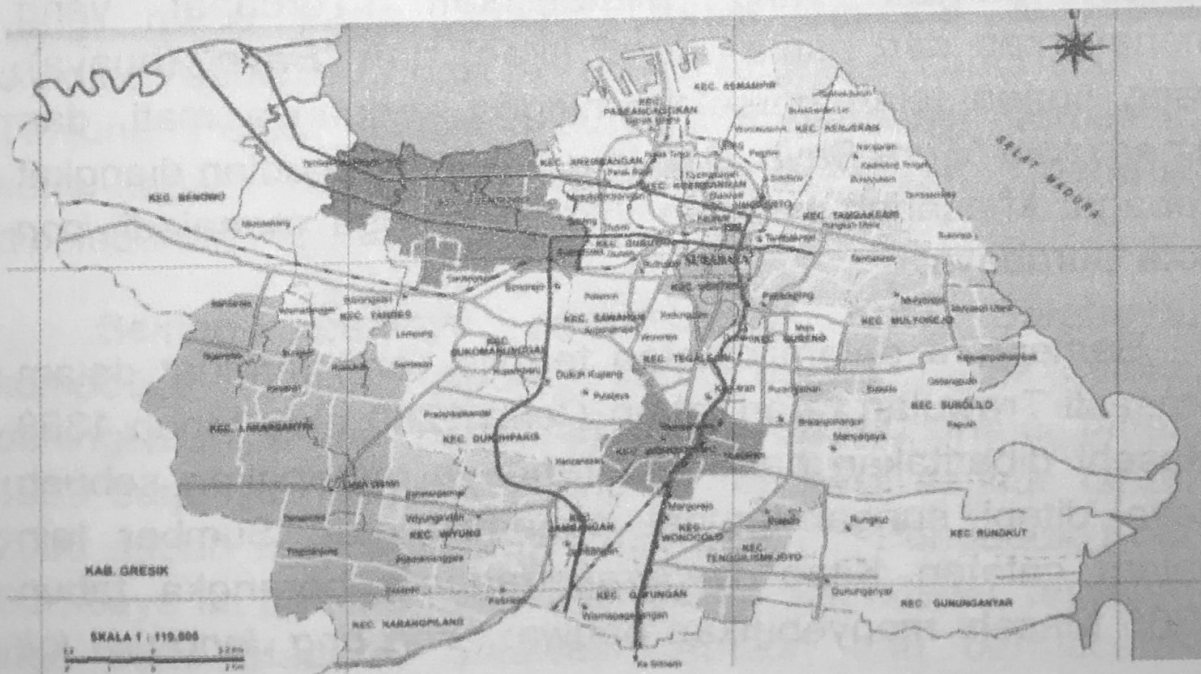
Selanjutnya **Bab VI** penutup dan dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar istilah dan singkatan, indeks, daftar gambar serta lampiran di antaranya peta Kota Surabaya dan sketsa peta pertempuran 10 Nopember 1945.

Terrekonstruksinya kembali peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya atau Palagan Surabaya dalam buku ini, diharapkan dapat menambah khasanah perbendaharaan atau referensi literer sejarah perang di jajaran TNI AD khususnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat patriotisme dan tumbuhnya jiwa propatria pada generasi muda Angkatan Darat.

BAB II

1. Kondisi Wilayah dan Keadaan Sosial Kota Surabaya.

Sebelum mengetahui peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, ada baiknya melihat terlebih dahulu kondisi wilayah dan keadaan masyarakat Surabaya secara umum. Karena karakteristik wilayah tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap tatanan sosial, politik, ekonomi, militer, budaya masyarakat yang mendiaminya.



Gambar 1. Peta Kota Surabaya

Sumber: Bakorsurtanal, *Atlas Tematis Prop Jawa Timur*, Regina, Jakarta, 1997, hal. 76.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Surabaya merupakan salah satu kota besar kedua di Indonesia setelah ibu Kota Jakarta, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan luas 350,54 km². Daerah ini terbagi menjadi 31 wilayah kecamatan yang mencakup 163 kelurahan.¹⁷⁾ Kota Surabaya berbatasan di sebelah selatan dengan kabupaten Sidoarjo, sebelah barat dengan kabupaten Gresik, serta sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura.

Kota Surabaya terletak di daerah yang sangat strategis, oleh sebab itu sejak jaman dahulu telah menjadi sebuah kota yang ramai dikunjungi. Terletak di daerah aliran sungai Brantas yang kemudian menjadi Kalimas. Sedangkan asal muasal penyebutan nama "Surabaya" sendiri banyak yang menafsirkan. Terdapat yang menafsirkan dari nama "Sura" (ikan) dan "Baya" (buaya), yang konon telah berseteru hingga keduanya mati, dan dinamakan "Sura-Baya. Dari legenda ini kemudian diangkat sebagai khasanah kearifan lokal sehingga menjadi icon kota Surabaya.

Sementara dalam catatan tertulis yang termuat dalam prasasti Trowulan I dari tahun Caka 1280 atau tahun 1358 Masehi diberitakan bahwa *Curabhaya* merupakan sebuah desa ditepi sungai tempat penambangan. Sumber lain dalam catatan Kitab *Negarakertagama* berangka tahun 1365 Masehi menyebutkan bahwa: "*Yen ring Janggala lok*

17) Bakorsutanal, *Atlas Tematik Provinsi Jawa Timur*, Regina, Jakarta, 2007, hal. 45.

sabha narpati ring Surabhaya ke Buwun”, yang artinya: “Jika di Jenggala ke laut, raja tinggal di Surabaya terus ke Buwun.”¹⁸⁾

Sejak awal abad XX Kota Surabaya telah tumbuh menjadi Kota besar yang modern, perannya selain sebagai pusat administrasi Jawa Timur juga sebagai pusat industri dan pelabuhan terbesar di Indonesia. Sehingga di kota ini tumbuh jalur lalu lintas transportasi ke berbagai daerah pedalaman Jawa Timur maupun ke Indonesia bagian timur lainnya. Sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur juga berkembang dengan pesat perusahaan-perusahaan jasa, bank-bank dan tempat-tempat pendidikan. Karena letak Kota Surabaya sangat strategis, berada dipinggir pantai yang, maka pada jaman kolonial Belanda Surabaya dijadikan sebagai pangkalan utama Angkatan Laut Belanda, Tanjung Perak. Selain melayani transportasi domestik, kapal-kapal besar internasionalpun dapat merapat dipelabuhan ini.

Seiring pesatnya pertumbuhan Kota Surabaya, komposisi pendudukpun tiap dekade mengalami peningkatan, tahun 1920 berjumlah 192.180 orang, tahun 1930 berjumlah 341.675 orang,¹⁹⁾ dan hasil sensus tahun 2005 sudah mencapai 2.744.076 jiwa.²⁰⁾ Penduduk Kota Surabaya ini bersifat multietnis, selain suku Jawa, terdapat juga etnis Madura, Sulawesi, Ambon dan bermacam-

¹⁸⁾ Nugroho Notosusanto, *Pertempuran Surabaya*, Pusjarah ABRI-Mutiara Sumber Wudya, Jakarta, 1982, hal. 3.

¹⁹⁾ *Ibid.* 3.

²⁰⁾ Bakosurtanal, *opcit.*

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

macam suku lainnya dari seluruh Indonesia. Mereka menyebut dirinya "Arek Suroboyo" atau putra Surabaya.

Sebagaimana sifat penduduk kota, di Surabaya juga terdapat stratifikasi kelompok sosial berdasarkan profesi, yaitu: *Kelompok buruh*, yaitu kelompok yang menggantungkan kehidupannya pada pabrik atau perusahaan. *Kelompok petani*, yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung pigiran kota. *Kelompok pedagang*, yaitu kelompok yang menggantungkan kehidupannya pada hasil jual beli. Pada umumnya kelompok ini yaitu pedagang menengah dan eceran, pemilik toko atau warung. *Kelompok pelaut dan nelayan*, yaitu kelompok yang menggantungkan kehidupannya dari hasil laut dan hasil angkutan/jasa laut. *Kelompok tukang*, yaitu mereka yang berprofesi pengrajin, tukang jahit, tukang listrik, tukang kayu, tukang bangunan dan sebagainya, dan *Kelompok elit pribumi*, yaitu para priyayi (pegawai atau guru), para cendekiawan, pelajar, pengusaha, kyai, pendeta, wartawan dan mereka yang bergerak dalam organisasi-organisasi lainnya.²¹⁾

Sebagaimana kehidupan di kota-kota besar, telah membentuk karakter dan kepribadian penduduknya yang serba keras, tidak kenal menyerah demi menyambung hidup. Penduduk kota Surabaya-pun demikian, namun hal tidak hilang adalah sifat kegotong royongan dan rasa solidaritas pada sesama, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerja.

21) Lebih jauh lihat: Nugroho, *opcit*, hal. 2-3.

Perkembangan Kota Surabaya merupakan cerminan daripada kemajuan ekonomi Kolonial Belanda maupun Jepang. Bagi bangsa Indonesia perkembangannya membawa akibat lain, yaitu semakin dalamnya jurang perbedaan antara si penjajah dan yang terjajah. Baik pada jaman Belanda maupun Jepang, kemiskinan sangat merajalela, kaum gelandangan yang pada waktu itu disebut *les miserables de Soerabaia*,²²⁾ dan itu terdapat hampir disemua pelosok kota Surabaya.

Pada masa penjajahan Belanda tahun 1930 terjadi depresi ekonomi yang melanda dunia, tentu sangat berpengaruh terhadap perdagangan dan industri di Surabaya. Lebih tragis lagi pada masa pendudukan Jepang, keadaan kehidupan di Surabaya berubah, lalu lintas perdagangan macet dibarengi dengan kemunduran industri dan ekonomi yang mengalami masa stagnan. Pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan besar tutup. Pengangguran meningkat dalam jumlah besar. Baru pada masa memasuki tahun 1943, sedikit demi sedikit oleh pemerintahan militer Jepang, beberapa perusahaan dibuka kembali.

Walaupun kehidupan masih dilanda kesulitan, namun lalu lintas perdagangan masih berjalan, dengan komoditas barang-barang sisa-sisa peninggalan jaman Belanda. Barang-barang mewah dan bahan makanan penjualannya mulai diatur oleh militer Jepang, pembeliannya melalui kupon-kupon yang diatur oleh kepala lingkungan, kepala desa atau camat, dan pembeliannyapun harus pada toko

²²⁾ *Ibid*, hal. 6.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

yang ditunjuk oleh Jepang. Akibatnya harga dipasaran melonjak, dan maraknya pasar gelap. Sudah barang tentu kehidupan yang demikian berpengaruh pada masyarakat Surabaya yang sebagian besar pekerja dan buruh.²³⁾

Pemerintahan militer Jepang di Surabaya berupaya melakukan penertiban dibidang pemerintahan dan perekonomian, yang lebih dititik beratkan pada upaya Nipponisasi. Upaya tersebut untuk mendukung usaha perang Jepang. Pengerahan harta benda dan pengerahan tenaga yang berguna untuk kemenangan perang. Pada tanggal 29 April 1943 dibentuk Barisan *Seinendan*, dan masih dalam tahun yang sama dibentuk pula *Heiho* (pembantu prajurit Jepang), *Peta* (Pembela Tanah Air), kemudian tahun 1944 dibentuk *Syuisintai* (Barisan Pelopor) dan *Jibakutai* (Satuan Berani Mati) dan lain-lain termasuk pengerahan tenaga *Romusha* (Pekerja Paksa). Situasi sosial dan ekonomi yang serba sulit baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang dialami oleh Bangsa Indonesia, termasuk rakyat Kota Surabaya.

23) *Ibid*, hal. 8



Gambar 2. Salah satu organisasi kepemudaan yang dibentuk Jepang yaitu Barisan *Seinendan*.

Sumber: Dokumen Pusjarah TNI, Jakarta, 1997, hal. 10.

2. Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Proklamasi RI.

Berita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 semula baru di terima di kalangan terbatas di Surabaya. Berita penting tersebut baru diketahui rakyat luas setelah harian Suara Asia di Surabaya tanggal 20 Agustus 1945 menyiarkannya. Selain berita proklamasi, harian tersebut juga memuat secara lengkap isi Undang-undang Dasar 1945, beserta nama Soekarno-Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditetapkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, segera diteruskan sebagai instruksi ke Surabaya agar dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Penolong

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Keluarga Korban Perang (BPKKP) beserta Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Proklamasi 17 Agustus 1945 didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, dari segenap golongan, segenap lapisan dan segenap aliran seluruh rakyat Indonesia, dari golongan, lapisan atau aliran apapun bersatu padu mendukung Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I.) mengadakan Sidang Istimewa yang menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain: Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional (yang kemudian dikenal sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Mengadakan dua belas buah Kementerian, dan menetapkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam 8 (delapan) buah propinsi yaitu Propinsi Sumatera, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sunda Kecil, Propinsi Maluku, Propinsi Sulawesi dan Propinsi Kalimantan.²⁴⁾

²⁴⁾ Sri Sutjiatiningsih, Gubernur, *opcit*, hal, 66-67.

Sekaligus ditunjuk gubernur yang memimpin dan mengepalai propinsi-propinsi tersebut, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat, Raden Pandji Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah, R.M. T.A. Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur, Mr. I. Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil, Mr. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku, Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi dan Ir. Pangeran Mohammad Noor - sebagai Gubernur Kalimantan.

Sesuai dengan keputusan Sidang Istimewa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, maka dibentuklah Kabinet Presidentil (Kabinet Pertama) Negara Republik Indonesia (tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 14 Nopember 1945) yang semuanya adalah sebagai berikut: Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subardjo, Menteri Dalam Negeri R.A. Achmad Wiranatakusumah, Wakil Menteri Dalam Negeri Mr. Hermani, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi²⁵⁾, Menteri Keamanan Rakyat ad interim Sulyadikusumo, Menteri Kehakiman Prof. Mr. Dr. Supomo, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin, Wakil Menteri Penerangan Mr. Alt Sastroamidjojo, Menteri Keuangan Dr.

²⁵⁾ Meskipun diangkat, namun tidak pernah muncul melakukan tugas dan tidak pernah menyatakan menerima pengangkatan tersebut. Maka pada tanggal 20 Oktober 1945 Sulyadikusumo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interrim. Lihat: Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Samsi,²⁶⁾ Menteri Kemakmuran Ir. Surachman Cokroadisuryo, Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosuyoso, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantoro, Menteri Kesehatan Dr. Bintaran Martoatmojo. Di samping itu ada beberapa orang Menteri Negara, yakni: Menteri Negara Mr. Amir, Menteri Negara K.H. Wahid Hasyim, Menteri Negara Mr. A.A. Maramis, Menteri Negara Otto Iskandar dinata, Menteri Negara Mr. Sartono.²⁷⁾

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1945 malam, Presiden Soekarno mengucapkan pidato radio yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pidato itu penting, karena melalui pidato itulah, Presiden Soekarno untuk pertama kali secara terbuka menjelaskan tujuan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Ditegaskan oleh Presiden bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia sejak dari semula tidak berubah, yaitu mewujudkan keselamatan dan kemakmuran bangsa Indonesia seluruhnya. Tujuan itu hanya bisa dicapai dalam negara Indonesia merdeka yang berdaulat dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

²⁶⁾ Berhenti pada tanggal 26 September 1945 di diganti oleh Mr. A.A. Maramis.

²⁷⁾ Sri Sutjiatiningsih, *opcit*, hal. 67-68.

Selanjutnya Presiden menekankan pentingnya perdamaian bagi Republik Indonesia, karena hanya melalui perdamaianlah maka keselamatan dan kemakmuran rakyat dapat terjamin. Presiden juga menjelaskan arti dan peranan KNI. Dikatakannya, bahwa KNI di daerah dan di pusat adalah penjelmaan kebulatan tujuan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Karenanya KNI harus meliputi semua aliran dan semua lapisan rakyat. Pangreh praja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda, pedagang, perniagaan dan lain-lain, harus bekerja sama dalam KNI. Tugas KNI adalah: Menyatakan kemauan rakyat,



mempersatukan rakyat, membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum; dan membantu pemerintah daerah menyelenggarakan kesejahteraan umum.²⁸⁾

Gambar 3.

Gubernur RMTA. Suryo.

Sumber:

Album Perjuangan TNI AD
Periode 1945-1950, Disjarahad

²⁸⁾ Pidato Presiden Sukarno, *Harian Suara Asia*, Surabaya, 23 Agustus 1945. Lengkapnya lihat: Moehkardi, R. *Mohamad Dalam Revolusi 1945 Surabaya*, Lima Sekawan, Jakarta, 1993, hal. 57.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Sesuai dengan hasil sidang istimewa KNIP, Raden Mas Temenggung Aryo Suryo diangkat sebagai Gubernur Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surabaya terbentuk yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang anggota. KNID Surabaya diketuai oleh Cak Dul Arnowo, sebagai Wakil Ketua I terpilih Bambang Suparto dan sebagai Wakil Ketua II terpilih Dwijosewojo S.H. sedang Roeslan Abdulgani sebagai Sekretaris. Anggota-anggota Komite Nasional Indonesia antara lain terdiri dari tokoh-tokoh terkenal seperti Siwabessy, Ir. Darmawan Mangunkusumo, Notohamiprojo, Dr. Moh. Suwandhi, H.M. Tohir Bakri dan H. Abdulkarim.

Pembentukan Propinsi Jawa Timur dan Penunjukkan RMT Suryo selaku Gubernur Jawa Timur, disambut antusias oleh rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya,²⁹⁾ yang berjiwa dinamis telah mengambil langkah-langkah yang positif dalam mendukung dan menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Para pemuda sudah tidak peduli dengan keberadaan Jepang yang menjaga *status quo*. Pada tanggal 25 Agustus 1945, atas inisiatif pemuda diselenggarakan rapat pembentukan KNI di Gedung Nasional Indonesia (GNI). Rapat menghasilkan keputusan susunan pimpinan dan

²⁹⁾ "Arek-arek Surabaya", maka tentunya yang kami maksudkan ialah penduduk kota Surabaya yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Jawa, suku Madura, suku Bali, suku Maluku, suku Bugis-Makasar, suku Sunda, suku Banjar, suku Minang-kabau dan lain-lainnya yang sudah berpadu menjadi satu.

anggota KNI Karesidenan Surabaya yang berjumlah 25 orang; Doel Arnowo terpilih sebagai ketua, Bambang Suparlan dan Mr. Dwidjosewojo sebagai Wakil Ketua sedang Roeslan Abdulgani sebagai penulis. Di antara para anggotanya terdapat nama-nama tokoh Surabaya yang mencerminkan perwakilan golongan dan lapisan masyarakat Surabaya, diantaranya antara lain ; Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo dan Dr. Siwabessy (keduanya orang pergerakan), H. Abdoelkarim dan H. Zarkasi (keduanya ulama), Mr. Dwidjosewojo dan RAA Soejadi (pangreh praja), Lim Thwan Tik (WNI keturunan Cina), Ny. Soemantri (organisasi wanita), Bambang Soeparto dan Roeslan Abdulgani (keduanya golongan pemuda).³⁰⁾

Aktivitas KNI Surabaya pertama adalah, mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Agustus yang berisi seruan agar penduduk Surabaya mulai tanggal 29 hingga 31 Agustus mengibarkan bendera kebangsaan Sang Merah Putih guna menyambut sidang pembukaan pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP); hari tersebut dinyatakan sebagai "Hari Indonesia".

Seperti yang kami telah singgung di depan tadi, pada tanggal 28 Agustus 1945 telah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya yang diketuai oleh Dul Arnowo. Kemudian pada tanggal 3 September 1945 diumumkan terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dengan terpilihnya Sudirman sebagai Residen,

³⁰⁾ *Ibid*, tanggal 28 Agustus 1945.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

disusul oleh pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipimpin antara lain oleh Kolonel Sungkono, Dr. Mustopo, Mohammad, Yonosewoyo dan lain-lainnya. Bahkan Angkatan Lautpun terbentuk pula di bawah pimpinan Atmaji.

Sementara itu Kesatuan Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia menolak untuk dilucuti senjatanya oleh tentara Jepang sebagaimana yang telah terjadi pada anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA). Seorang Inspektur Polisi Tingkat I yang bernama Mohammad Yassin, salah seorang perwira polisi dari Kesatuan Polisi Istimewa kemudian mengumumkan dan memproklamasikan bahwa *Tokubetsu Keisatsu Tai* adalah Kesatuan Polisi Republik Indonesia. Dengan leburnya Kesatuan Polisi Istimewa atau *Tokubetsu Keisatsu Tai* itu menjadi Kesatuan Polisi Republik Indonesia lengkap dengan segala alat persenjataannya makin bertambahlah unsur kekuatan perjuangan bersenjata Negara Republik Indonesia.

Antusiasme rakyat Kota Surabaya terhadap proklamasi kemerdekaan RI, begitu besar dengan serempak melakukan gerakan mengibarkan bendera nasional Sang Merah Putih di seluruh pelosok Kota Surabaya. Bahkan Arek-arek Surabaya yang sudah bergelora semangat kemerdekaannya tidak segan-segan menurunkan bendera Jepang *Hinomaru*, karena tentara Jepang telah menyerah tanpa syarat dan tentunya tidak boleh lagi mengibarkan benderanya di tanah air Indonesia

yang telah merdeka. Hanya bendera Merah Putih saja yang boleh berkibar.

Dalam bulan September 1945 pekik "Merdeka" yang penuh semangat kemerdekaan menggema di seluruh Pelosok Kota Surabaya. Setiap orang yang bertemu dengan seorang teman atau kenalan, apalagi kalau seorang pemuda atau Pejuang bertemu dengan teman seperjuangannya selalu memberi salam dengan mengepalkan tinjunya seraya memekik "Merdeka....!" yang dijawab pula dengan pekikan "Merdeka!" yang lebih bersemangat seraya mengepalkan tinjunya pula.

Sementara itu tentara Jepang sendiri sudah mendapat perintah dari Sekutu agar mempertahankan *status-quo* dan tidak boleh merubah keadaan pemerintahan apalagi menyerahkan senjata yang dikuasainya kepada siapa dan pihak manapun juga selain kepada tentara Sekutu yang sampai saat itu belum juga datang.

3. Perebutan Objek Penting dan Senjata dari Tangan Tentara Jepang.

Setelah KNID Surabaya terbentuk, selanjutnya massa rakyat Surabaya digalang oleh KNID melalui rapat akbar yang ditujukan untuk mencurahkan segala tenaga mengisi dan membela kemerdekaan RI. Rapat Akbar pertama diselenggarakan di Tambaksari tanggal 13 dan 21 September 1945 dan Rapat Akbar kedua dilakukan di Pasar Turi yaitu tanggal 17 September 1945.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Rapat Akbar tersebut tambah membakar semangat kemerdekaan membangun tekad yang bulat rakyat Surabaya untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara Jepang tidak berdaya sama sekali menghadapi semangat kemerdekaan rakyat Surabaya yang meluap-luap itu. Bahkan tentara Jepangpun ngeri juga melihat semangat Arek-arek Surabaya yang sudah bertekad dan rela mati untuk membela kemerdekaan tanah-airnya. Yang sangat ditakuti oleh tentara Jepang ialah senjata Bambu Runcing rakyat biasa.

Semangat kemerdekaan Arek-arek Surabaya sudah tidak dapat dibendung lagi oleh tentara Jepang. Gejala-gejala bentrokan senjata antara para pemuda yang tergabung dalam BKR dan para pejuang serta laskar bangsa Indonesia di Surabaya dengan tentara Jepang tidak dapat dihindari lagi. Sebab untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah air yang terancam oleh Jepang dan Sekutu, para anggota BKR dan pemuda pejuang bangsa Indonesia di Surabaya sangat membutuhkan senjata, sedangkan senjata berada di tangan tentara Jepang yang sudah kalah perang.

Bagi anggota BKR dan pemuda pejuang dan laskar, senjata yang ada di tangan tentara Jepang itu harus direbut itulah satu-satunya jalan memperoleh senjata untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada kalanya senjata itu dapat direbut melalui diplomasi tanpa ada korban yang harus jatuh, Akan tetapi jikalau tentara Jepang di suatu daerah terlalu takut atau terlalu

patuh kepada perintah tentara Sekutu atau memang dengan sengaja tidak mau menyerahkan senjatanya kepada TKR dan para pemuda pejuang bangsa Indonesia di Surabaya, maka mau tidak mau senjata itu terpaksa harus ambil dengan kekerasan. Maka di mana-mana terjadilah pertempuran-pertempuran yang seru antara tentara Jepang yang harus mempertahankan *status-quo* dan rakyat Indonesia dipelopori oleh para pemudanya yang ingin membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah-airnya di Surabaya. Hal ini membuktikan, bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah tentara Jepang.

Pada waktu itu tentara Jepang memang berada dalam keadaan terjepit dan seperti kata pepatah, bagaikan memakan buah simalakama, kalau dimakan ayah mati, tetapi kalau tidak dimakan ibu yang akan mati. Menyerahkan senjata kepada rakyat Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan tanah airnya berarti tidak mentaati dan melanggar perintah tentara Sekutu. Tidak menyerahkan senjata berarti harus berani menghadapi rakyat Indonesia yang sudah meluap-luap semangat kemerdekaannya dan pasti akan memancing rakyat yang memang sudah sangat benci kepada tentara Jepang yang kejam. Jadi tentara Jepang harus memilih antara dua hal yang kedua-duanya mengandung resiko yang sama besarnya: Dihukum oleh tentara Sekutu atau bertempur melawan dan memperbesar rasa benci rakyat Indonesia.

Demikian pula pengoperan kantor-kantor dan penurunan bendera Jepang *Hinomaru* di kantor-kantor yang

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

tadinya dikuasai oleh Jepang, tidaklah selalu berjalan lancar tanpa ketegangan dan tanpa kesukaran apa-apa. Adakalanya harus melalui ketegangan dan kontak fisik terlebih dahulu dengan pihak Jepang. Akan tetapi kalau pihak Jepang itu tidak mau mengerti cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, serta hanya patuh pada pihak Sekutu yang mengalahkannya. Akan tetapi semangat kemerdekaan Arek-arek Surabaya makin bergelora. Tekad mereka sesuai dengan semboyan perjuangan pada waktu itu, yakni: "*Merdeka atau Mati!*"

Hampir semua kantor di Kota Surabaya berhasil diambilalih dan bendera Jepang diganti dengan Bendera Merah Putih kecuali gedung *Kenpetai* dan beberapa markas militer Jepang seperti Markas Besar Angkatan Darat Jepang dan Markas Besar Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu.

Namun dengan keberhasilan Residen Soedirman menyusun aparaturnya sipil RI dan keberhasilan KNI membentuk BKR dalam bulan September 1945 hakekatnya baru merupakan kekuasaan "semu", selama tentara Jepang masih bersenjata. Maka Dualisme antara pemerintahan sipil RI dengan penguasa militer Jepang itu harus diakhiri. Ini berarti tentara Jepang harus dilucuti senjatanya sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucutinya.

Menjelang terjadinya gerakan massa merebut senjata Jepang, di Surabaya telah terjadi beberapa peristiwa penting yang mendahului dan mematangkan situasi

pecahnya konflik senjata yaitu Rapat Akbar di Tambaksari tanggal 13 dan 21 September 1945, dan Rapat Akbar di Pasar Turi tanggal 17 September 1945 dan insiden penyobekan bendera bendera Belanda di *Hotel Oranye*, Tunjungan tanggal 19 September 1945.³¹⁾

Khususnya setelah selesai Rapat Akbar di Tambaksari tanggal 21 September yang dilanjutkan dengan pawai raksasa keliling kota, berhasil mengobarkan semangat dan membulatkan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendukung pemerintahan RI secara lebih nyata. Sedang insiden bendera di Tunjungan yang meminta korban seorang pemimpin Belanda tewas dan dua pemuda luka-luka, memancing kebingungan pemuda Surabaya.³²⁾

Peristiwa tadi juga membuka mata pemuda, bahwa wibawa dan keangkeran tentara Jepang kini telah merosot, karena dalam peristiwa itu tentara Jepang yang mengawal *Hotel Oranye* hanya bersikap masa bodoh tidak memberikan reaksi.

Rapat raksasa Tambaksari 21 September adalah, sejumlah tokoh pemuda yang menyelenggarakan rapat

³¹⁾ Moekhardi, *Sebuah Biografi R. Mohamad Dalam Revolusi 1945 Surabaya*, Lima Sekawan, Jakarta, 1993, hal. 69. Lebih jauh lihat: Surat Kabar Suara Karya tanggal 20 September 1989.

³²⁾ *Ibid.* Insiden di *Hotel Oranye* terdapat beberapa versi tentang tokoh pelakunya antara lain dapat dibaca: Budi Tyokrodjoyo, *Harian Merdeka* 7 Juli 1973 dan 19 September 1980. Kuano Wibowo *Surat Kabar Merdeka* 23 September 1980 dan *Majalah Gema Angkatan 1945* Nomor 44/50 Juli 1980 dan Januari 1981.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

tersebut, di antaranya Soemarsono, ditangkap dan diinterogasi *Kempeitai* (Polisi Militer Jepang). Mereka kemudian dibebaskan dengan peringatan keras agar jangan mengulangi aksi mereka. Tetapi peringatan *Kempeitai* itu tidak digubris pemuda, mereka kini bahkan lebih berani lagi beraksi.

Setelah Rapat Akbar di Tambaksari tadi, pemuda Surabaya kemudian melakukan aksi penyobekan plakat-plakat larangan Jepang, seperti larangan berpawai dan membawa senjata tajam, larangan membawa bambu runcing. Plakat tadi kemudian diganti dengan plakat-plakat baru dan corat-coret tembok yang berisikan semboyan-semboyan perjuangan. Menyusul kemudian aksi pengambilan alih gedung dan obyek vital serta penempelan plakat bertuliskan "Milik Republik Indonesia". Pada akhir bulan September 1945, aksi pemuda semakin meningkat, terjadi perampasan mobil dan senjata Jepang secara perorangan dan kemudian berubah menjadi aksi massal melucuti senjata kesatuan-kesatuan tentara Jepang, dimulai pada kesatuan Jepang yang terpencil kemudian meningkat pada markas dan tangsi tentara Jepang.

Bersamaan dengan kegiatan BKR dan para pejuang lainnya melucuti tentara Jepang, pada tanggal 23 September 1945 tiba Kapten PM. J.G. Huiyer dari Jakarta membawa tugas dari Laksamana Muda Patterson untuk mengadakan penyelidikan ke pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)³³⁾. P. J.G. Huiyer adalah seorang Kapten

³³⁾ Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal. 84.

Angkatan Laut Kerjaan Belanda, setelah tiba di Surabaya ia selalu berhubungan dengan Laksamana Muda Shibata (Panglima Angkatan Laut Jepang), sedangkan temannya berhubungan dengan pembesar-pembesar Jepang bagian sipil, terutama dengan *Hashiki*, kepala pemerintahan sipil bagian urusan peranakan. Situasi itu di satu pihak menimbulkan kebanggaan dan kecongkakan orang-orang Belanda dan Indo Belanda yang berada di Surabaya. Di lain pihak menimbulkan kecurigaan pada para pemuda Indonesia terhadap orang-orang Belanda dan Jepang yang berada di Surabaya pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.

Kecurigaan rakyat Surabaya makin meningkat setelah mereka mendengar berita yang tersebar luas di kalangan masyarakat, bahwa di Surabaya telah ada gerakan orang Belanda yang bernama "Anti Indonesia Merdeka" dengan semboyan "*Dood Alle Inlanders*" (Bunuhlah semua bangsa Indonesia). Gerakan tersebut kemudian dibantu oleh orang-orang Jepang anggota "Kipas Hitam" atau "*The Black Fan*."³⁴⁾ Kecurigaan rakyat yang makin mendalam itu ternyata mengobarkan semangat juang rakyat Jawa Timur (Surabaya) untuk mengisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Apabila emosi sudah tidak dapat dikendalikan maka meletus aksi-aksi yang penuh tekad dan keberanian.

Demikianlah semangat juang rakyat Surabaya (Jawa Timur) makin meningkat ketika pada 27 September

³⁴⁾ *Ibid*, hal. 85.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

1945 Balatentara Jepang di Surabaya mengeluarkan peraturan-peraturan yang antara lain berisi larangan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat mengganggu ketenteraman, dan penempelan plakat-plakat di tempat yang mudah dibaca rakyat. Rakyat dan para pemuda Surabaya tidak sabar lagi.

Mulai saat itu mereka bergerak serentak melanda hampir seluruh Kota Surabaya. Mereka mengadakan aksi merobek-robek plakat Jepang dan menggantikannya dengan poster-poster serta coret-coret pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api, yang berisi semboyan-semboyan perjuangan untuk menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal yang demikian itu ditanggapi oleh Balatentara Jepang dengan mengadakan penjagaan yang ketat disepanjang jalan Kota Surabaya. Namun demikian rakyat dan para pemuda Surabaya tidak gentar menghadapi mereka. Bahkan dengan keberanian mereka mengadakan perlucutan senjata terhadap tentara Jepang yang melakukan penjagaan, yang kemudian menyerahkannya kepada BKR (Badan Keamanan Rakyat).

Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, rakyat makin sadar akan kemerdekaannya, mereka sukar untuk menerima adanya "kekuasaan bayangan" Jepang di samping Pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat makin sadar, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus diisi sendiri dan dipertahankan sendiri. Dalam hal ini mereka akan berhadapan dengan dua lawan, yaitu militer Jepang dan orang-orang bekas interniran Belanda, yang saling

membantu. Pada waktu itu telah banyak senjata milik Jepang yang diserahkan kepada orang-orang Belanda.

Satu-satunya kekuatan senjata Republik Indonesia di Surabaya yang masih terhimpun kokoh adalah Pasukan Polisi Istimewa (*tokubetsu Keisatsutai*) yang dipimpin oleh seorang pemuda Sulawesi, Muhammad Yasia. Para pemuda dan rakyat Surabaya pun sadar, bahwa untuk dapat mempertahankan diri sebaik-baiknya, mereka harus memiliki senjata serta alat-alat perhubungan dan alat-alat untuk bergerak cepat.⁷⁸ Akibatnya terjadilah gerakan secara bergelombang, perebutan kekuasaan di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta (*Sakura*) yang kemudian meluas ke markas-markas kesatuan tentara Jepang.

Demikianlah misalnya. "Gerakan Pemuda Kantor Radio Surabaya" (*Surabaya Hosokyoku*) kemudian mengambil alih kekuasaan kantor Radio Surabaya dari penguasa Jepang. sehingga pada tanggal 27 September 1945 pukul 18.00 Radio Surabaya memperkenalkan dirinya sebagai "*Radio Republik Indonesia Surabaya*". Pada 1 Oktober 1945 pemuda gerakan bawah tanah di Kantor Pembagian Minyak Daerah Jawa Timur Pemerintah Militer Jepang (*Sekiyu Haikyu Jimusho Thobu Sisho*) di bawah pimpinan S. Kasman telah berhasil mengambil alih ke-

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

kuasaan dari penguasa Jepang (Kepalanya Bernama Kato), yang disaksikan oleh Residen Sudirman.³⁵⁾

Sejalan dengan peristiwa tersebut di atas, di jalan-jalan mobil-mobil Jepang dirampas oleh para pemuda, senjata-senjata milik serdadu dan opsir-opsir Jepang mereka ambil gudang-gudang Jepang mereka serbu dan di mana-mana ditemplei slogan-slogan seperti "*Milik RI*", "*Hidup RI*", "*Up Republik*" dan sebagainya.³⁶⁾ Gerakan pengoperan kekuasaan makin meningkat setelah Pucuk Pemerintahan Karesidenan Daerah Surabaya R. Sudirman, pada 1 Oktober 1945, menyampaikan pernyataan pengoperan kekuasaan kepada *Syuucookan* Surabaya, yang isinya sebagai berikut:

1. *Sekarang sudah tiba saatnya bagi kami untuk mengurus Pemerintahan sendiri dengan selengkap-lengkapnyanya: maka karenanya, segala urusan Pemerintahan di dalam negeri ini akan kami urus dan selesaikan dengan tenaga sendiri dan mulai sekarang hanya menjalankan titah Pemerintah Republik Indonesia.*

2. *Oleh karena itu, maka mulai sekarang juga segala urusan dengan wakil-wakil negeri-negeri Serikat yang mengenai soal-soal negara, penduduk, harta benda penduduk dan sebagainya. sudah*

³⁵⁾ Nugroho Notosusanto, *ibid*, hal. 86. Lebih jelas lihat: S. Kasman, *Organisasi Bawah Tanah Yang Saya Kemukakan Sendiri Sebelum Proklamasi RI.*

³⁶⁾ *Ibid*, hal. 87.

*seharusnya dirundingkan dan diselesaikan oleh dan dengan kami sendiri.*³⁷⁾

Surat pernyataan tersebut segera diikuti dengan tindakan, sehingga pada 2 Oktober 1945 seluruh kantor *Syuucookan* (Gubernur) di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Surabaya. Selain itu surat pernyataan tersebut juga merupakan komando bagi rakyat dan para pemuda Surabaya untuk mengadakan serangan umum terhadap penguasa-penguasa Jepang. Dengan menggunakan taktik penyerangan "gelombang manusia" rakyat dan pemuda Surabaya di bawah pimpinan BKR, PRI. Polisi Istimewa dan lain-lainnya. dengan serentak mulai menyerang Gedung *Kempetai* pada 1 Oktober 1945. Markas Besar Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu, Markas Angkatan Darat Jepang di Darmo, Gunungsari, Sawahan (gudang senjata dan mesiu di DON BOSCO), Markas Angkatan Laut (*Kaigun*) Gubeng lain-lainnya. Bahkan perebutan kekuasaan PAL (Penataran Angkatan Laut) di Ujung pada 2 Oktober 1945 dapat dilaksanakan dengan damai (tanpa dengan pertempuran).³⁸⁾

Pada masa akhir September 1945, aksi pemuda tadi telah meningkat menjadi pemberotakan umum. Dipelopori BKR, Pemuda Polisi istimewa,³⁹⁾ Pemuda Republik

³⁷⁾ *Ibid.*

³⁸⁾ *Ibid.*

³⁹⁾ *Ibid*, hal. 70. Pasukan Polisi Istimewa (*Takubetsu Keisatsutai*) dibentuk Jepang sebagai pasukan cadangan dan penggempur, bersenjata lengkap tempur dan dilatih intensif dalam semangat siap tempur.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Indonesia (PRI), massa rakyat yang bersenjata aneka ragam senjata tajam dan sedikit senjata api, menyerbu gudang senjata Jepang di *Don Bosco* jalan Tidar, markas dan tangsi tentara Jepang *Kohara Butai* Gunungsari, *Kitahama Butai* di gedung *Lendeteves*, Markas *Kempeitai* di gedung *Landraad*, Pangkalan Udara Morohkembangan dan lain-lain. Perebutan senjata tersebut ada kalanya melalui pertempuran yang menelan korban, seperti yang terjadi di *Markas Kempeitai* tanggal 1 Oktober 1945, tetapi ada kalanya cukup melalui perundingan seperti yang terjadi di *Don Bosco* dan markas Besar Angkatan Darat Jepang di Gedung HVA di Jl. Sikatan. Pengepungan terhadap gudang senjata *Don Bosco*, terjadi pada tengah malam tanggal 30 September 1945⁴⁰⁾.

Berbeda dengan Peta dan Heiho, pada masa akhir pemerintahannya, Jepang tidak membubarkan pasukan ini. Dibawah pimpinan Moh. Yasin Soetjipto Danoekoesoemo, pasukan ini memainkan peranan penting melucuti senjata Jepang di Surabaya. Baca, M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 1952, h. 46 - 47.

- 40) *Ibid*, hal. 70. Mengenai tanggal awal terjadinya perebutan senjata berbagai buku dan tulisan lain, belum ada keseragaman. Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal. 14, menyebutkan, pengepungan *Don Bosco* terjadi tanggal 16 September 1945. Jadi sebelum peristiwa Penyobekan bendera di Tunjungan 19 September. Padahal nyatanya dalam peristiwa Tunjungan itu, pemuda belum memiliki senjata. Buku Catalan Sungkonomenyebut peristiwa tadi terjadi pada tanggal 27 September, sedang buku Dokumenter Pemuda (hal. 51) menyebut tanggal 29 September, Laporan Kolonel PJG, Huyer dan Letkol Roelofsen menyebut tanggal 1 Oktober 1945. Penulis memilih tanggal 30 September, sesuai dengan laporan harian *Soeara Rakyat* Surabaya tanggal 3 Oktober 1945.

Gudang tersebut menempati sebuah kompleks Sekolah Katolik *Don Bosco* di jalan Tidar Surabaya. di dalamnya tersimpan bukan saja senjata ringan, tetapi tersimpan pula senjata berat seperti meriam pantai dan meriam Penangkis Serangan Udara (PSU) beserta mesinya. Senjata itu merupakan peninggalan tentara Belanda yang dirampas tentara Jepang. Gudang senjata itu dikawal oleh satu Detasemen tentara Jepang di bawah pimpinan Mayor Hazimoto.

Ribuan massa pemuda bersenjatakan aneka ragam mengepung dan siap menyerbu gudang senjata tadi. Mereka terdiri atas pemuda kampung di sekitar lokasi gudang, pemuda pelajar STM, SMA, SMP, pemuda PRI, BKR dan kesatuan polisi. Mereka tinggal menunggu komando menyerbu, apabila pihak tentara Jepang tetap tidak mau menyerahkan senjatanya. Menghadapi kepungan massa itu, pihak pasukan kawal Jepang juga sudah siap siaga, mereka ada yang *steling* di bawah truk dan ada juga yang siap siaga di atas pohon dengan senjata senapan mesin yang siap memuntahkan peluru. Sementara itu pemuda yang berhati panas, sudah tidak sabar lagi menunggu komando dan ingin penyerbuan segera dilakukan.

Di tengah massa pemuda di *Don Bosco* itu, hadir salah seorang pimpinan BKR Surabaya yaitu R. Mohamad yang kehadirannya bukan disengaja, melainkan secara kebetulan saja. Dalam suasana Surabaya yang semakin panas itu, Mohamad sudah beberapa hari tidak pernah pulang ke rumah. Ia siaga di markas BKR dan sebentar-sebentar melakukan peninjauan keliling kota.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Pada tengah malam tanggal 30 September itu ketika R. Mohamad melakukan peninjauan keliling kota dengan mobilnya, ia tertahan massa yang memadati jalan Tidar. Kedatangannya tepat pada saat batas kesabaran para pemuda hampir habis. Hadir pula di tempat itu, Sutomo wartawan Antara dan beberapa orang pemimpin PRI. Sutomo yang dikemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo, bersama Mohamad menyadari betul gawatnya situasi. Karena kalau betul sampai terjadi *clas* yang mengarah pada situasi *chaos* (bentrokan yang mengarah pada kekacauan), pasti akan jatuh banyak korban, terutama di pihak pemuda. Oleh sebab itu, R. Mohamad dan Bung Tomo, kedua pemimpin tersebut sepakat untuk menempuh jalan damai melalui perundingan. Bergantian mereka berpidato, mencoba meredakan emosi pemuda dan menyatakan niatnya untuk menempuh dulu jalan perundingan. Emosi pemuda bisa diredakan. Bung Tomo, Mohamad dan beberapa orang pemimpin pemuda lainnya, kemudian masuk menemui pimpinan tentara Jepang.

Upaya perundingan berjalan alot, Mayor Hazimoto pada awalnya keberatan menyerahkan senjata dengan alasan belum ada perintah dari panglima mereka. Setelah didesak dengan berbagai dalih dan mengingatkan bahwa Jepang dahulu pernah berjanji akan memberi kemerdekaan, Mayor Jepang tersebut hatinya bisa dilunakkan. Dia menjanjikan akan menyerahkan senjatanya besok pagi, setelah melaporkan kepada panglimanya. Tetapi ia meminta syarat, agar yang menerima penyerahan senjata bukan rakyat, melainkan Kepolisian RI sebagai instansi resmi pemerintah RI. Janjinya diperkuat pula oleh pihak

Kempeitai yang hadir dalam perundingan itu. Selesai berunding, Bung Tomo dan Mohamad kemudian memberi tahukan hasil perundingan pada massa yang menunggunya. Massa rupanya cukup puas dengan hasil perundingan itu dan bersedia membubarkan diri meninggalkan Markas Jepang di *Don Bosco*.

Sesuai rencana esoknya utusan pemerintah RI di bawah pimpinan Mohamad Jasin dari unsur Kepolisian RI di Surabaya datang menagih janji Mayor Hazimoto ke *Don Bosco*. Dalam pembicaraan kedua, komandan Jepang bertanya apakah para utusan sanggup menjaga keamanan. Mohamad Jasin menjawab, sanggup. Asalkan mereka selaku aparat pemerintah RI diberi senjata. Melalui prosedur resmi, memakai surat serah terima, gudang senjata beserta isinya diserahkan kepada pihak Indonesia melalui Mohamad Jasin dan seorang anggota KNI yang menandatangani surat serah terima tersebut. Melalui prosedur demikian tentara Jepang menganggap dirinya telah memenuhi dua kewajiban mereka. Pertama, menjamin keamanan dan ketentuan seperti yang diwajibkan oleh tentara Sekutu; kedua, memberikan senjata yang amat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga Negara Republiknya.⁴¹⁾

⁴¹⁾ *Ibid*, hal. 72. Wawancara dengan HR Mohamad Mangoendiprodjo, 7 Juli 1988 dan wawancara dengan Mayjen Pol. Purn. Moh. Yasin, 9 Oktober 1988. Dalam perundingan *Don Bosco* buku Nugroho Notosusanto, *Opcit.* h.al 14, tidak menyebutkan nama Mohamad tetapi menyebut nama pelaku lain, diantaranya Subianto Notowardojo dan Mamahit keduanya guru Sekolah Teknik. Nama

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Begitu diserahkan, terutama senjata ringannya, langsung dibagikan kepada satuan-satuan BKR serta kelompok-kelompok pemuda pejuang dan laskar yang hadir pada saat itu.⁴²⁾ Dari gudang senjata itu pula, Surabaya kemudian biasa mengirimkan bantuan senjata ke Jakarta dan sejumlah kota lain di Pulau Jawa. Dengan modal senjata tadi para pemuda kemudian melakukan penyerbuan ke markas dan tangsi Jepang lainnya.



Gambar 4. drg. Mustopo sukses memimpin pelucutan senjata tentara Jepang di Jawa Timur hingga dapat mempersenjatai satu Divisi TRI

Sumber:

Album Perjuangan TNI AD Periode 1945-1950, Disjarahad 1977.

Di pihak lain pada hari itu juga terjadi pula pengepungan oleh massa rakyat yang terdiri dari anggota BKR, pemuda pejuang dan laskar. Dilakukan upaya

perundingan di *Markas Tobu Jawa Butai* di Gedung HVA.

Mohamad disebut dalam buku Bung Tomo atau Frans M. Parera, Op.cit, h. 26 - 29.

⁴²⁾ *Ibid*, hal. 72. tentang: Wawancara dengan Achmad Notojudo, 27 - 11 - 1981 dan A. Wijono, 2 - 12 - 1981, dua pelajar Sekolah Teknik yang hadir dalam peristiwa Don Bosco.

Hadir di pihak Indonesia dalam perundingan tersebut, drg. Moestopo, Abdul Wahab, Moh. Yasin, Moedjoko dan Rahman, sedang di pihak Jepang yang hadir adalah Mayor Jendral Iwabe Syigeo selaku Panglima Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur (*Tobu Jawa Boetaico*) dan perwira stafnya. Moestopo dan Abdul Wahab mewakili BKR, sedang Moh. Yasin dan Moedjoko mewakili Kepolisian RI di Surabaya.

Jenderal Iwabe semula keberatan menyerahkan semua senjata Jepang yang disimpan di *Markas Tobu Jawa Butai*. Tetapi setelah didesak dan diperingatkan bahwa massa rakyat telah mengepungnya, Jenderal Iwabe akhirnya bersedia menyerahkan senjata, dengan catatan ada pimpinan aparat negara yang bertanggung-jawab dan kesanggupan bangsa Indonesia untuk menjaga keamanan serta melindungi orang-orang Jepang yang telah menyerah⁴³⁾. drg. Moestopo menegaskan bahwa Dia yang bertanggung-jawab, selaku komandan BKR dan wakil dari Gubernur Jawa Timur.⁴⁴⁾ Surat serah terima senjata kemudian ditandatangani bergantian oleh mereka yang hadir. Dengan modal surat itu, berbagai kesatuan Jepang di tempat lain kemudian bersedia menyerahkan senjatanya.

Namun di kesatuan Polisi Militer Jepang (*Kempeitai*) berjalan lain, Markasnya terletak di *Gedung Landraad*

⁴³⁾ *Ibid*, hal. 73. FM. Parere, *Opcit*, h. 41.

⁴⁴⁾ *Ibid*, tentang Wawancara drg. Moestopo, 30 -1 -1976, Mayjen Pol. Pum. Moedjoko, 3 - 3 -1989 dan Mayjen Pol. Purn. Moh. Yasin, 9 10 - 1988.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

(Gedung DPR jaman Belanda) di depan karesidenan (kini berdiri tugu pahlawan) terjadi perebutan senjata dengan pertempuran. Sebab secara hirarkis Kesatuan *Kempeitai* tidak berada di bawah komando Kesatuan setempat, melainkan langsung di bawah kendali Markas Besar *Kempeitai* di Jakarta. Karena itu kesatuan *Kempeitai* ini semula tidak mau menyerahkan senjata mereka, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1945 pecah pertempuran yang menelan korban kurang lebih 35 orang pemuda tewas. Salah seorang komandan BKR Abdul Wahab luka berat, Dia selaku Komandan BKR Karesidenan Surabaya. Kesatuan Jepang lain yang semula tidak mau menyerahkan senjatanya adalah kesatuan *Kaigun* (Angkatan laut) di bawah pimpinan *Laksamana Madya* Shibata. Tetapi setelah menghadapi serbuan massa dan pertempuran seru di tangsi *Kaigun* di Gubeng pada tanggal 3 Oktober 1945, Shibata akhirnya mengikuti jejak Iwabe menyerahkan senjatanya kepada BKR dan para pejuang lainnya.

Pada waktu itu pertahanan, tentara Jepang di Jawa Timur memang berada di bawah komando Jendral Iwabe, Panglima Divisi Jepang Wilayah Jawa Timur yang markas besarnya berada di Jalan Darmo dan Laksamana (Vice Admiral) Syibata Yaichiro, Panglima Angkatan Laut (*Kaigun Seiko Shikikan*) di Surabaya, bermarkas di Jalan Embong Wungu Surabaya.⁴⁵⁾ Sementara itu para pemuda di tiap lingkungan RT dan RW dikoordinir oleh BKR dan PRI

⁴⁵⁾ Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal. 84, lebih jelas Lihat: Djapen RI, *Propinsi Jatim*, hal.40-43.

(Pemuda Republik Indonesia). Begitu juga para pemuda di bidang Kelautan telah menyusun kekuatan dalam organisasi KNIPAL (Komite Nasional Indonesia Penataran Angkatan Laut), AMPAL (Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut), BKR-Laut dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia).

Ketika sedang hangat-hangatnya pergolakan, pihak Jepang mengajak pemimpin-pemimpin Indonesia untuk berunding (kira-kira 2 Oktober 1945).⁸⁶ Maka Drg. Mustopo (Ketua BKR Jawa Timur) dan Ketua KNI Surabaya Dul Arnowo datang di markas tentara Jepang di gedung HVA (*Handels Vereenigino Amsterdam*); sekarang PNP XX-XXI-XXIV di Jalan Merak 1 Surabaya. Syuucookan sebagai juru bicara pihak Jepang, menuntut agar bangsa Indonesia segera menghentikan serbuan, kalau tidak dihentikan Surabaya akan di bom. Tuntutan itu ditolak oleh Ketua BKR Jawa Timur, dengan alasan bahwa pihak Jepang telah pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia tetapi sekarang justru membantu bangsa Barat untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia akan membela kemerdekaannya. Jika terlepas tembakan dari pihak Jepang, maka aksi pemberontakan akan membakar seluruh Jawa Tirnur dan orang-orang Jepang tidak tidak akan terjamin lagi keamanannya.

Setelah mendengar ultimatum tersebut. Syuucookan Surabaya memberi instruksi kepada semua jajarannya di Jawa Timur untuk berunding dengan BKR guna mengatur

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

ketertiban. Sedangkan Jendral Iwabe Shigewa, Panglima Divisi Jepang di Jawa Timur, memerintahkan tentara Jepang untuk menyerah kepada BKR dengan seluruh senjata dan gudang-gudangnya. Sebaliknya pihak Indonesia menyanggupi untuk menjaga keamanan Jepang.⁴⁶⁾ Alih kewenangan Jendral Iwabe itu kemudian diikuti dengan penyerahan kekuasaan Laksamana Shibata Yaichiro kepada pemerintah Republik Indonesia. Demikianlah pada 7 Oktober 1945 di Kantor Gubernur Surabaya terjadi peristiwa penandatanganan naskah serah terima pengoperan kekuasaan, yang berbunyi sebagai berikut:

..... SURAT PENYERAHAN PENERIMAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Mori Takso, Rear Admiral soedah mendapat kekoeasaan dari Shibata Yaichiro, Kaigoen Saikoo Sikikan oentoek menjerahkan kekoeasaan seluas-luasnja serta segala harta benda jang terhitoeng

didalamnja seloeroeh Oedjoeng dalam mana terhitoeng semoea Boetai jang termasoek didalamnja kepada: pemerintah Repoeblik Indonesia.

Dengan perantaraan Padoeka Toean wakil Goebernoer Djawa Timoer, merangkap pekerdjaan Residen Soerabaja, dengan pengharapan soepaja segala oeroesan dengan

⁴⁶⁾ Nugroho Notosusanto, *Ibid*, hal. 88

fihak Negara-negara Serikat dapat dibereskan dengan sebaik-baiknya.

*Jang menerima, Wakil Goebernoer Djawa Timoer Residen
Soerabaya*

Ttd. Soedirman

Ttd. Mori

Saksi-saksi;

KOMITE NASIONAL INDONESIA

1. *ttd. B. Soeparto*

Untuk toeroenan,

(tak terbatja)

2. *ttd. Moch. Affandi*

Turunan dari turunan,

ttd.

3. *ttd. Moenadji.*⁴⁷⁾

Tuty Nawangsih.

Penyerahan Kompleks Ujung tersebut diawali serbuan serentak BKR Surabaya, PAL, BKR Laut, Kepolisian (P3) serta badan-badan perjuangan, yang kemudian diserahkan secara resmi oleh Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia. Suatu hal yang menarik perhatian ialah bahwa setiap kali berhasil melakukan pengoperan kekuasaan, selalu diikuti dengan penurunan bendera Jepang (*Hinomaru/kokki*) dan menggantikannya bendera Sang Merah Putih.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hal. 89.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

Memang pada saat itu di Surabaya terdapat dua penguasa. Di satu pihak penguasa RI yang sah dilain pihak penguasa Jepang yang melaksanakan perintah Sekutu untuk menjaga *status quo*. Maka oleh pihak RI di Surabaya dilaksanakan perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang. Pertama Tangsi Don Bosco diserbu dan akhirnya diserahkan Jepang. Kemudian pengoperan Pusat Organisasi Bermotor Dai Nippon di Jawa Timur, menyusul pengoperan Radio Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Perang. Hanya gedung *Kempeitai* (bekas gedung *Reght Van Justisie*) yang tidak masih dipertahankan oleh tentara Jepang.⁴⁸⁾

Dengan demikian pada tanggal 7 Oktober 1945 secara resmi kekuasaan dan militer daerah Karesidenan Surabaya, bahkan seluruh Jawa Timur telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Kesemuanya itu berkat kesatu paduan antara rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Rupanya gerakan pengambilalihan kekuasaan itu meluas ke luar batas Karesidenan Surabaya hingga ke Karesidenan Besuki, Malang, Kediri dan Madura.

Dari uraian tersebut nampak dengan jelas. bahwa di Jawa Timur pada bulan September dan Oktober 1945 sedang berlangsung aksi-aksi pengibaran bendera dan perebutan kekuasaan. Aksi-aksi tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh rakyat dan pemuda yang tergabung

⁴⁸⁾ Mohammad Mustadji, *Surabaya di Akhir Tahun 1945*, Dep Dikbud, Surabaya, 1994, hal. 18.

dalam organisasi-organisasi kemiliteran dan organisasi perjuangan. Tentang bagaimana pembentukan organisasi-organisasi tersebut, baiklah kita bicarakan.

Suasana dan wajah Kota Surabaya mendadak berubah, suasana "menang perang" menyelimuti Kota Surabaya. Pemuda yang merasa bangga dengan hasil senjata rampasannya mondar-mandir dengan menyandang senjata. Banyak di antara mereka yang baru pertama kali memegang senjata, juga anak kecil menembakkan senjata mereka ke udara. Gegap gempita bunyi letusan senjata, seperti pesta lebaran saja layaknya. Sementara itu di jalan raya, truk penuh pemuda dan mobil panzer rampasan yang dikendarai pemuda mantan Peta, mondar mandir tidak henti-hentinya. Di simpang jalan, di pintu gerbang kampung dan di gedung penting tampak sejumlah pemuda berjaga-jaga dengan senjata siap di tangan. Pada masa itu para pemuda dan pemudi merasa malu apabila hanya tinggal di rumah, tidak melibatkan diri dalam Perjuangan, meskipun hanya bersenjata tajam mereka ikut berjaga-jaga menjaga kampung dan wilayahnya masing-masing.

Setelah senjata Jepang dilucuti dan instalasi vital dikuasai oleh pihak pejuang RI, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1945 di gedung Markas *Kempeitei* diselenggarakan perundingan antara pimpinan RI di Surabaya dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Jenderal Iwabe Syigeo dan komandan *Kempeitai* di Surabaya. Dalam pertemuan itu secara resmi pimpinan Jepang menyerahkan seluruh senjata dan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia dan

BAB II

Kedadaan Sosial Politik Militer

selanjutnya bangsa Indonesia yang bertanggung jawab mengatur ketentraman dan keamanan serta menjamin keselamatan para tentara Jepang yang ditawan.⁴⁹⁾

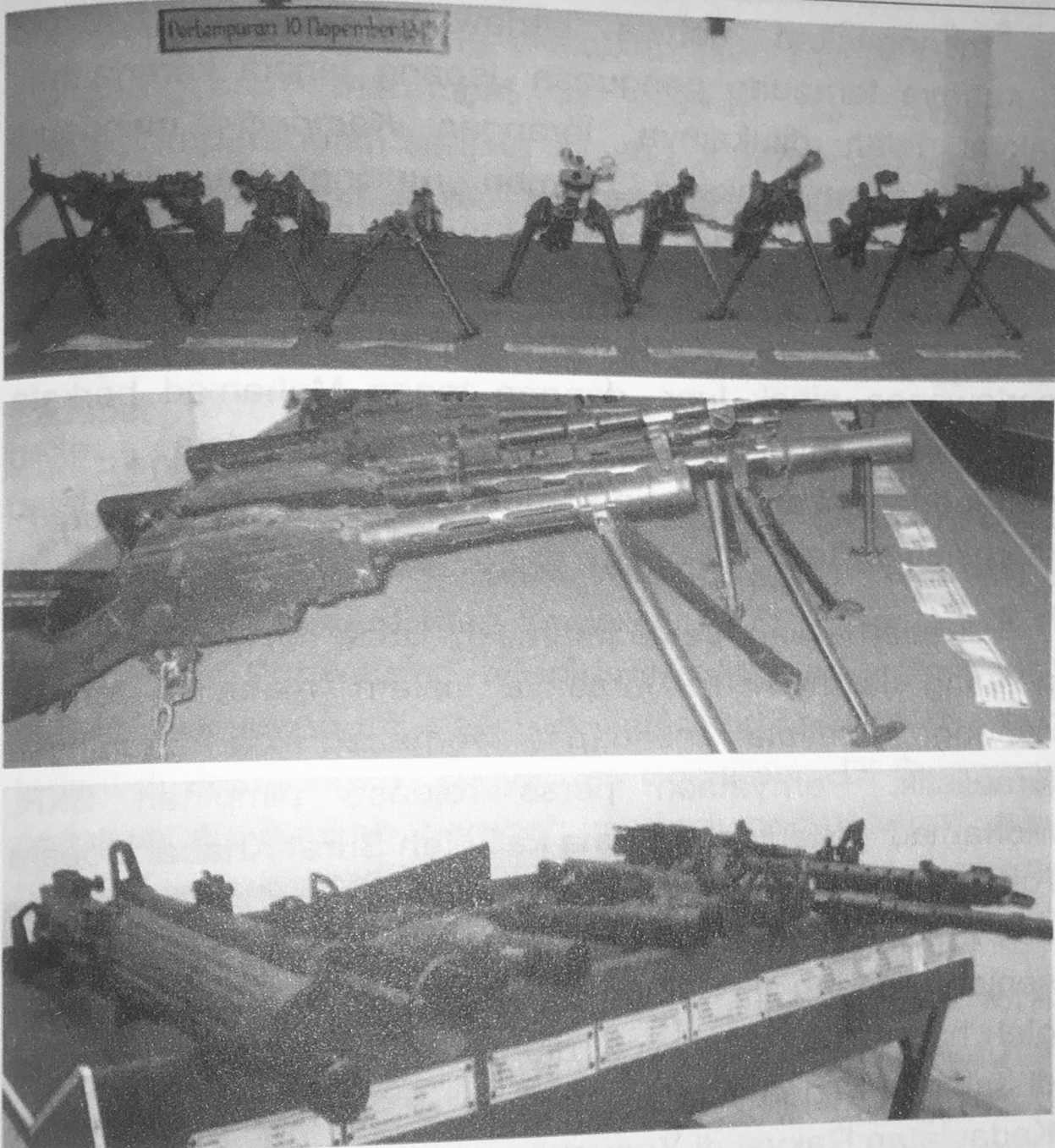
Senjata dan peralatan perang tentara Jepang yang berhasil dirampas oleh BKR dan para pejuang kurang lebih: Senapan 19.000 pucuk, Pistol otomatis 700 sampai 846 pucuk, SMR 422 sampai 720 pucuk, SMB 480 sampai 504 pucuk, Pelontar granat 148 buah, Meriam infanteri 17 buah, Mortir 63 buah, Mortir baru 400 buah, Meriam Anti Tank 14 sampai 25 buah, Meriam gunung 19-27 buah, Meriam Berat 3 sampai 4 buah, Meriam anti pesawat terbang 142 sampai 145 buah, Tank 16 unit, Panzer 62 unit, Kendaraan 1900 unit,⁵⁰⁾ dan 400 Kelewang serta menawan lebih dari 30.000 orang Jepang.⁵¹⁾

49) *Ibid*, hal. 74. *Harian Soeara Rakyat*, Surabaya, 3 Oktober 1945.

50) Aminuddin Kasdi, *Pertempuran 10 Nopember 1945*, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya, 10 Nopember 1945, Panitia Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 Nopember 1945 di Surabaya, Surabaya, 1986, hal. 150.

51) *Ibid*, hal. 149.

PALAGAN SURABAYA 10 NOVEMBER 1945,
Heroisme Rakyat Surabaya



Gambar 5. Beberapa jenis senjata yang berhasil direbut dari tentara Jepang oleh Arek-arek Suroboyo, dipergunakan dalam Palagan Surabaya 1945 **Sumber:** Museum Kodam V/Brawijaya, Malang.

Selaku pimpinan BKR, R. Mohamad tampil dalam media pers. Dalam wawancaranya dengan para wartawan

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

ia menegaskan bahwa perlawanan serentak rakyat Surabaya terhadap penguasa Jepang terjadi karena hati rakyat telah dilukainya, larangan *Kempeitai* mengenai senjata tajam, takeari (bambu runcing) dan lain-lain, dirasakan oleh rakyat sebagai penghinaan dan menjadi sebab langsung dari perlawanan tersebut. Menanggapi pertanyaan pers, bagaimana sikap kita menghadapi perlawanan pihak luar, dengan tegas Mohamad berkata bagaimanapun juga bangsa Indonesia akan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.⁵²⁾

Keberhasilan pemerintah RI, BKR, laskar dan para pejuang lainnya di Surabaya dalam melucuti tentara Jepang, ternyata mendapat perhatian dari kalangan jurnalistik. Pernyataan perss release pimpinan BKR, Mohamad disiarkan pertama kali oleh Surat Khabar Soeara Rakyat Surabaya yang terbit pertama tanggal 3 Oktober 1945. Harian tersebut meliputi kisah pertempuran merebut senjata Jepang di Surabaya. Berita tadi kemudian dikutip oleh harian lain diberbagai daerah seperti Harian Merdeka di Jakarta, harian Warta Indonesia di Semarang dan harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta.

⁵²⁾ Loccit, lihat juga: Surat Khabar, *Soeara Rakyat*. Surabaya, 3 Oktober 1945.

Akibatnya apa yang dilakukan oleh rakyat Surabaya dengan cepat merambat ke daerah lain. Terjadilah kemudian perebutan senjata Jepang di berbagai kota besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Seperti di Malang pada tanggal 3 Oktober 1945, Solo pada bulan Oktober 1945, Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945, Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 1945, Purwokerto pada tanggal 20 Oktober 1945, Magelang pada tanggal 13 Oktober 1945 dan mencapai klimaksnya pada Pertempuran Lima Hari di Semarang mulai tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut ada yang berlangsung secara damai melalui jalan perundingan semata seperti yang terjadi di Malang dan Purwokerto, tetapi ada pula yang berlangsung melalui pertempuran dan meminta korban seperti yang terjadi di Pekalongan, Yogya dan Semarang. Di Semarang peristiwa itu bahkan berubah menjadi pertempuran yang bersifat terbuka berdarah yang mengerikan dan meminta korban besar di kedua belah pihak.⁵³⁾

Menyusul penyerahan senjata secara resmi oleh penguasa Jepang pada tanggal 1 Oktober 1945, maka hari itu pula Residen Soedirman selaku pejabat tertinggi RI di Surabaya, secara resmi pula menyatakan pada *Syuutjookan* (Residen Jepang) bahwa mulai hari itu tanggal

⁵³⁾ *Ibid*, hal. 75. Kisah lengkap "Pertempuran 5 Hari di Semarang" tulisan Moehkardi, bisa dibaca pada buku *Terbukalah Jalanku*. Dewan Harian 1945, Jakarta, 1976, Korban diperkirakan mencapai ± 2000 di pihak Indonesia dan ± 200 orang di pihak Jepang.

BAB II

Keadaan Sosial Politik Militer

1 Oktober 1945 hanya pemerintah RI lah yang berkuasa di Surabaya, dan sejak itu segala urusan dengan tentara Sekutu akan ditangani oleh Perintah RI.⁵⁴⁾ Dengan demikian secara *de facto* pemerintah RI yang berkuasa penuh di Surabaya.

⁵⁴⁾ *Ibid*, hal. 74. Lihat *Soeara Rakyat* 3 Oktober 1945